
Peraturan Kpu No 11 Th 2013

ICONEG 2019

Hukum Islam Dalam Politik Indonesia: Dari Masa Ke Masa Jilid 2

Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)

Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi

HAK POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN

KOMPILASI MAKALAH SEMINAR IKAHI

Jurnalistik

Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia

PENGAMANAN PILKADA KALTENG DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Dalam Persepektif Protokol Kesehatan

Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah

JALAN TERJAL MENUJU PEMILU 2014

DPR RI periode, 2009-2014

JALAN BERLIKU DEMOKRASI INDONESIA

Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat

WAJAH KORUPSI DI INDONESIA (HIMPUNAN ARTIKEL ILMIAH-POPULER TERANGKAI)

Konflik politik di KPU dalam pemilu 1999

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kelembagaan Pemilu untuk Pemilu Bermartabat

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara

Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas

Penataan ulang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia

Menggugat Demi Keadilan - Jejak Pustaka

SENGKETA-SENGKETA TATA USAHA NEGARA KHUSUS (Dari Sengketa Informasi Publik sampai Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu

PERKARA-PERKARA POLITIK PILKADA DI PENGADILAN JILID 2

Menguak Dana Kampanye Dalam Pemilu Legislatif 2014

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu

DEMOKRASI KERUMUNAN (Bunga Rampai tentang Demokrasi, Pemilu dan Budaya Politik)

Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi

Pemilihan Umum 1999: Buku lampiran I-XII

Peradilan Etik dan Etika Konstitusi

Korupsi Mengorupsi Indonesia

Politik hukum pembentukan undang-undang

Praktik Money Politics dalam Perspektif Sosio Legal Normatif

DKPP Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat

Pilkada Ramah HAM

Etika Komunikasi

Pemilihan Umum 1999: Buku lampiran I-XII

Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum

*Peraturan Kpu No 11
Th 2013*

*Downloaded from
intra.itu.edu by guest*

JAYCE SUTTON

ICONEG 2019 Komnas HAM
"Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014,
Paradigma Baru Pengawasan Pemilu".
Begitulah kami memberi tajuk buku seri politik ini. Secara sederhana, dari tajuk tersebut dapat dimaknai bahwa buku ini hendak bertutur tentang betapa tidak-mudahnya jalan terselenggaranya pesta demokrasi lima tahunan yang memuaskan semua pihak –terutama rakyat dan partai politik. Bahkan, buku ini sampai mengupas secara khusus kegaduhan politik yang bakal meruyak di tahun 2013-2014 yang dalam kalender Cina dikenal pula sebagai Tahun Ular. Maklum, sepanjang tahun 2013 sampai sekitar April 2014, kita bakal disuguhi prosesi perhelatan demokrasi politik mulai dari penetapan partai politik peserta Pemilu 2014 sampai berpuncak pada Pemilu presiden dan wakil presiden pada medio 2014. Sebuah proses yang jelas penuh hiruk-pikuk dan trik-intrik politik. Namun, sesungguhnya, buku karya Achmad Fachrudin ini tidak semata-mata memaparkan seputar warna-warni perhelatan demokrasi periodik lima tahunan tersebut. Kita mesti pahami bahwa perhelatan demokrasi pemilihan umum (Pemilu) tidak akan berjalan fair dan memuaskan semua pihak bilamana tidak dikelola dengan sistem manajemen dan tata kelola penyelenggaraan yang baik dan benar. Dalam penyelenggaraan Pemilu setidaknya terdapat pihak-pihak: partai politik peserta, penyelenggara (Komisi Pemilihan Umum/KPU), lembaga kontrol/pengawas (Badan Pengawas

Pemilu/Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan rakyat selaku pemilik suara. Semua pihak harus siap berjalan dan bekerja dalam koridor sistem manajemen dan tata kelola yang baik dan benar. Sistem manajemen itu sendiri menyangkut prinsip-prinsip manajemen, yakni perencanaan strategis, pengorganisasian yang efektif, pengarahannya yang jelas, dan penilaian (kontrol) yang tegas. Prinsip-prinsip manajemen ini harus berjalan pada rel yang tepat dan benar. Sedangkan tata kelola yang baik tercermin dari adanya transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), kemandirian (independent) dan keadilan (fairness). Apakah penyelenggaraan Pemilu selama ini telah memuaskan semua pihak? Jawabnya: jelas belum. Mengapa hal ini terjadi? Salah satunya karena pengawasan atau kontrol tidak berjalan sebagaimana mestinya. Buku berjudul *Kegaduhan Politik di Tahun Ular* ini berusaha mengupas model dan hal-hal pengawasannya yang merupakan salah satu unsur penting demi terlaksananya sebuah pesta pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (fair). Banyak orang memandang bahwa Pemilu 1955 sebagai pemilu yang paling memenuhi syarat-syarat tersebut. Bagaimana sebenarnya protret pengawasan dan lembaga pengawas pemilu di masa itu? Bagian pertama buku ini mencoba memenuhi rasa ingin tahu pembaca seputar persoalan pengawasan dan pengawas pada satu-satunya Pemilu yang berhasil diselenggarakan oleh regim Orde Lama itu. Lantas, pada masa Orde Baru, unsur

pengawasan dan lembaga pengawas pemilihan umum menjadi unsur paling lemah –kalau tidak bisa dikatakan dilemahkan—dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pengawasan dan lembaga pengawas menjadi subordinat kekuatan (pemerintahan) yang tengah berkuasa. Pemilihan umum pun direkayasa agar negeri bernama Republik Indonesia ini dianggap sebagai sebuah negara demokrasi. Sebagai penulis, Achmad Fachrudin berupaya menguraikan bagaimana wajah pengawasan dan lembaga pengawas pemilihan umum selama Soeharto berkuasa memimpin regim Orde Baru tersebut. Satu pesan penting di sini bahwa kita harus belajar dari kelemahan-kelemahan Pemilu selama Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997) agar pada pemilihan umum selanjutnya tidak mengulang kesalahan yang sama yang pada waktu itu (seperti) dilembagakan. Berikutnya, buku ini memaparkan pasang-surut Pemilu pada era Reformasi, mulai dari Pemilu 1999 sampai terakhir Pemilu 2009 yang dituding tidak berkualitas. Dari sini kemudian berkembang bahasan yang mengupas betapa pentingnya kehadiran (lembaga) pengawas yang tegas yang memang sangat dibutuhkan oleh KPU, Partai Politik dan Rakyat yang mendambakan Pemilu yang fair. Kita membutuhkan lembaga pengawas yang diisi oleh orang-orang yang berkualitas dan berintegritas. Karena, banyak kasus pelanggaran penyelenggaraan Pemilu yang telah tampil sebagai sebuah extraordinary crime yang harus dituntaskan secara tegas dan memenuhi rasa keadilan. Kita membutuhkan paradigma baru kepengawasan Pemilu yang lebih baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Guna menggapai terbentuknya lembaga pengawas Pemilu

yang tegas, berkualitas penuh integritas, sebagaimana dipaparkan pada Bagian 5 buku ini, maka kita perlu membangun spirit of the corp pengawas Pemilu, mengembangkan organisasi dan manajemen SDM yang mumpuni, memantik partisipasi aktif rakyat, dan menangani sengketa Pemilu secara tuntas dengan mengedepankan rasa keadilan. Selanjutnya, buku ini memaparkan sejumlah perkembangan peta jalan menuju Pemilu 2014. Tergambar antara lain sengketa verifikasi Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilu pada awal 2013, problematika transparansi dan konsistensi, dan perlunya kemitraan dan sinergitas semua pihak. Buku ini pun disudahi dengan bagian yang khusus memaparkan Rencana Strategis Bawaslu 2010-2014. Mulai dari kekuatan, peluang, permasalahan dan tantangan; visi-misi; serta tujuan dan arah kebijakan strategis Bawaslu. Dengan rencana strategis Bawaslu yang terencana dan tertata apik diharapkan mampu tercapai sebuah penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Menjadikan Pemilu (pura-pura) selama masa regim Orde Baru menjadi Pemilu yang demokratis kini dan masa mendatang. Bagi kami, dan boleh jadi juga bagi Anda pembaca sekalian, buku merupakan warisan hidup tentang peristiwa dan para pelakunya dalam satu rentang perjalanan zaman. Kami berharap pembaca dapat menikmati buku “warisan zaman” ini sebagaimana halnya saat kami menuliskannya. Dalam lindungan dan karunia-Nya, kiranya kita senantiasa dalam kondisi sehat serta sukses dan maslahat dalam berkarya.

Hukum Islam Dalam Politik Indonesia: Dari Masa Ke Masa Jilid 2 Komnas HAM Political conflicts in KPU, the National Election Commission in the 1999 general

election in Indonesia.

Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Keira Publishing
Komnas HAM menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum sebagai penjelasan dan panduan dalam mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, termasuk terhadap kelompok rentan.

Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi LP2AB

Keberadaan partai politik beserta sistemnya yang diberlakukan tentunya akan secara otomatis membawa arah suatu negara dalam mewujudkan cita-cita negara, hal itu dikarenakan pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, terlebih dalam suatu negara tentunya memiliki kultur politik serta sistem politik yang akan berpengaruh pada tingkat politik di pusat hingga politik di daerah dan seterusnya sampai ke tingkat politik pemerintahan yang terendah. Secara tidak langsung partai politik dapat diartikan sebagai jembatan untuk mewujudkan pembangunan dalam keberlangsungan suatu Negara. Hal ini dapat dikatakan bahwa partai politik memiliki tugas penting dalam pemerintahan, yaitu bersama masyarakat, berusaha mencapai kontrol pemerintahan, menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka atau kelompok pendukungnya serta mengorganisasi dan membujuk pemilih untuk memilih calon mereka agar menempati jabatan tertentu.

HAK POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN

Prenada Media

Documentation of the 1999 election in Indonesia.

KOMPILASI MAKALAH SEMINAR IKAHI

Sinar Grafika

On legislative body and parliamentary practice in Indonesia; collection of articles.

Jurnalistik Prenada Media

Praktik money politics pada proses demokrasi saat ini tumbuh subur dan dianggap sebagai sebuah kewajaran di level akar rumput (grass root) dengan tanpa mempertimbangkan aspek normatif hukum dan akibat yang ditimbulkan. Hal ini terjadi karena akibat dari pragmatisme politik yang dilakukan oleh para elit politik yang menyebar ke dalam kultur masyarakat. Praktik money politics dalam kontek politik sekarang seringkali dimaknai sebagai shadaqah, hibbah, hadiah, dan lain sebagainya. Pergeseran istilah money politics ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultur masyarakat yang melazimkan kegiatan itu terjadi dan menjadi alat kampanye yang cukup ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih calon tertentu. Sehingga kecerdasan intelektual dan kesalehan pribadi tidak menjadi tolak ukur kelayakan. Buku ini akan membahas persoalan praktik money politics dari perspektif sosial dan legal normatif hukum. Harapannya bisa dijadikan sebagai kerangka tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (political behavior) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap dan pemberian dalam arti sesungguhnya. Wallahua'lam bi al shawab.

Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia GUEPEDIA

Laporan ini menyajikan temuan hasil pemantauan JPPR dalam Pemilu 2014 tentang dana kampanye. Paling tidak, ini merupakan ikhtiar JPPR untuk tetap memelihara jiwa-jiwa kesukarelawanan dalam melakukan pemantauan Pemilu yang semakin hari semakin sepi, khususnya dalam isu dana kampanye.

PENGAMANAN PILKADA KALTENG DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Dalam Persepektif Protokol Kesehatan Jejak Pustaka

This book constitutes the thoroughly refereed proceedings of the International Conference on Environmental Governance held in Makassar, Indonesia. The 67 full papers presented were carefully reviewed and selected from 212 submissions. The papers reflect the conference sessions as follows: ICT and Environmental Sustainability, Electronic Environmental Monitoring, E-Government for Environmental System, Environmental law and politics, Sustainable future for human security, Disaster risk reduction, Climate change and adaptive capacity, Islamic environmental thought, Socio-environmental conflicts, Global environmental change, Sustainable development goals (SDGs), Ocean policy and governance, Rural development and planning, Forest governance and conservation, Water and soil conservation, Business and CSR, and Urban vulnerability and resilience.

Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia

Pemilu 2019 untuk pertama kalinya diselenggarakan dengan skema serentak. Dalam skema ini, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan

presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Skema ini berbeda dengan skema pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi, yakni pemilihan legislatif pelaksanaannya mendahului pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan skema keserentakan, yang dicermati adalah bagaimana partai politik menyiapkan calon atau kandidatnya baik untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Bagi partai politik, untuk mendapatkan calon-calon yang akan diajukan dalam surat suara pemilu dilakukan melalui proses seleksi. Selain kandidasi, partai politik juga membangun koalisi untuk mengajukan calonnya dalam pemilihan presiden. Buku ini mengkaji mengenai kandidasi dan koalisi partai politik pada Pemilu Serentak 2019. Di dalamnya membahas sistem pemilu serentak, kandidasi untuk pemilihan legislatif tingkat pusat, kandidasi pemilihan presiden, dan koalisi partai politik.

JALAN TERJAL MENUJU PEMILU 2014

Yayasan Pustaka Obor Indonesia Sistem kaidah atau norma yang menuntun dan mengendalikan perilaku ideal manusia dalam kehidupan bersama dapat berupa norma-norma agama (religious norm), norma etika (ethical norm), dan norma hukum (legal norm). Ketiga sistem norma atau kaidah itu timbul alamiah dalam kenyataan hidup manusia secara universal. Pada mulanya, ketiganya bersifat saling melengkapi secara komplementer dan sinergis satu sama lain, tetapi dengan perjalanan waktu dan perkembangan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat timbul perbenturan antartiga sistem norma itu dalam praktik. Gejala perbenturan antarsistem itulah yang direspons secara berbeda-beda oleh aliran pemikiran yang

berkembang dalam sejarah. Aliran positivisme Comte yang berpengaruh besar dalam sejarah dengan tegas berusaha dan berhasil memisahkan sistem norma hukum dari pengaruh sistem agama, dan bahkan dari sistem etika. Bahkan dalam 'Stufen theori des recht' (pure theory of law)-nya Hans Kelsen, ditegaskan bahwa norma hukum harus dibersihkan atau dimurnikan dari aneka pengaruh sosial, politik, ekonomi, dan apalagi pengaruh etika dan agama.

DPR RI periode, 2009-2014 Samudra Biru

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya adalah upaya untuk memenuhi hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana tersirat dalam pasal 43 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sejalan dengan itu, hasil Pilkada yaitu Kepala Daerah yang terpilih, juga ditujukan untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak-hak asasi manusia.

Sebab pihak yang paling bertanggungjawab atas kondisi HAM adalah pemerintah seperti termaktub dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal itu bisa dimaknai juga HAM menjadi tanggung jawab Kepala Daerah.

JALAN BERLIKU DEMOKRASI INDONESIA European Alliance for Innovation Pelaksanaan demokrasi elektoral yang telah berkali-kali digelar baik itu pilkada serentak ataupun pemilu serentak masih menyisakan persoalan, terutama berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu mulai dari pencalonan, daftar pemilih, kampanye, dana kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi. Permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan kerap kali

merupakan problem berulang dan klasik tetapi terus menerus terjadi. Revitalisasi yang digaungkan oleh pihak terkait termasuk juga partai politik hanya terfokus pada pemenangan elektoral tetapi menyentuh pada pembenahan atas evaluasi yang dilakukan. Tidak peduli apakah kemenangan tersebut diraih dengan menghalalkan segala cara seperti politik uang, memobilisasi aparatur sipil negara dan kepala desa, politik dinasti dan kekerabatan, penggunaan anggaran dan fasilitas negara lainnya, melakukan suap kepada penyelenggara pemilu dan cara lain yang dilakukan dengan mencederai nilai-nilai demokrasi. Stein Ringen dalam bukunya berjudul *What Democracy is For* (2007) menyatakan bahwa demokrasi bukan hanya sekadar sarana meneguhkan sebuah pemerintahan yang sah. Lebih dari itu, demokrasi harus menghadirkan kehidupan warga yang bahagia, sejahtera, aman, dan nyaman (human security and well being) yang dilalui dengan proses penyelenggaraan demokrasi prosedural yang berkualitas dan berintegritas. Jangan sampai ada cacat bawaan dalam demokrasi prosedural yang menyebabkan pasca pemilu rapuh di demokrasi substansi. Tantangan pemilu serta pemilihan serentak 2024 yang akan semakin berat, dari aspek penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih. Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan presiden, serta pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD I dan II, digelar pada 14 Februari 2024. Sementara pemilihan kepala daerah digelar secara serentak pada November 2024. Adanya irisan tahapan antarpemilu dan pemilihan mengakibatkan berbagai potensi rawan akan terjadi. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka problem berulang yang terjadi pada pilkada dan

pemilu berpotensi menghilangkan kepercayaan publik pada demokrasi. Buku ini merupakan catatan kritis yang dilakukan oleh penulis selama mengikuti perjalanan dan sepak terjang di Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018, 2020 serta Pemilu Serentak 2019. Meskipun tidak tersusun rapi dan detail di setiap sub tahapan proses penyelenggaraan, terdapat beberapa catatan krusial semisal pada logistik serta proses pemungutan dan penghitungan suara yang dibahas secara terperinci. Oleh karenanya, mohon dimaklumi jika terdapat data-data yang dicantumkan masih dalam bentuk progress. Bab pertama berisikan mengenai sejarah dan pelaksanaan pilkada serta pemilu serentak dengan pendekatan deskriptif-naratif. Bab kedua mengulas perempuan dan politik, tantangan yang dihadapi khususnya pada tahapan kampanye serta strategi komunikasi politik perempuan. Bab ketiga memaparkan bagaimana lingkaran kontestasi yang membutuhkan biaya tinggi dan mendorong terjadinya tindakan korupsi. Tertangkapnya kepala daerah dan caleg terpilih pascaelektoral menggambarkan bahwa saat ini di internal partai politik mengalami krisis integritas. Siklus ini terus menerus berputar dari pemilihan ke pemilihan berikutnya.

Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat Irfan Hilmi

On the need for re-arranging of hierarchical structure of Indonesian legislation.

WAJAH KORUPSI DI INDONESIA (HIMPUNAN ARTIKEL ILMIAH-POPULER TERANGKAI) Penerbit NEM

Buku ini merupakan kumpulan tulisan pemikiran di bidang hukum dari para pakar dan praktisi hukum mengenai berbagai topik hukum yang pernah dibawakan pada seminar nasional dalam

rangka hari ulang tahun IKAHI yang diikuti oleh peserta yang terdiri dari pada hakim 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. IKAHI sebagai perkumpulan hakim Indonesia senantiasa berupaya mengawal dan mendukung tegaknya negara hukum dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Sejarah peradilan di Indonesia tidak bias dilepaskan dari peran serta IKAHI sebagai perkumpulan hakim untuk memperjuangkan kemandirian dan reformasi kekuasaan kehakiman. Sadar akan peran strategis, harkat dan martabat, serta besarnya tantangan yang sedang dan akan dihadapi bangsa Indonesia dalam penegakan hukum dan keadilan, maka Hakim Indonesia bertekad mengembangkan profesionalisme dan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam pembangunan hukum nasional termasuk diantaranya melalui kegiatan-kegiatan ilmiah berupa seminar nasional yang diselenggarakan pada setiap hari ulang tahun IKAHI. Kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan dan profesionalisme hakim, maka Pengurus Pusat IKAHI mengumpulkan tulisan-tulisan pemikiran di bidang hukum dari pakar dan praktisi hukum mengenai berbagai topik yang disampaikan pada seminar nasional tersebut secara digital agar lebih mudah diakses lebih meluas oleh para hakim Indonesia guna menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum.

Konflik politik di KPU dalam pemilu 1999 UNY Press

SENGKETA-SENGKETA TATA USAHA NEGARA KHUSUS (Dari Sengketa Informasi Publik sampai Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu)

Penulis : M. Adiguna Bimasakti Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-863-1 Terbit : November 2020

www.guepedia.com Sinopsis : Dalam dua dekade terakhir, bermunculan beberapa Undang-Undang yang mengatur sengketa-sengketa TUN baru yang bersifat khusus baik dari objek sengketanya, maupun hukum acaranya. Dalam perjalanannya ditemukan banyak permasalahan dalam kaidah-kaidah yang diatur dalam Undang-Undang khusus tersebut. Faktanya, ketentuan yang berkaitan dengan sengketa khusus tersebut sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang ada saat ini, sehingga tidak dapat serta merta digunakan kaidah-kaidah hukum acara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian terjadilah kekosongan hukum (rechtsvacuum). Kemudian Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum acara tersebut mengeluarkan beberapa peraturan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara untuk sengketa-sengketa khusus tersebut. Selain itu Mahkamah Agung pun dilekati kewenangan-kewenangan atau kompetensi absolut mengadili sengketa khusus dalam undang-undang tertentu yakni Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu. Oleh karena itu buku ini membahas secara komprehensif mengenai hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan Mahkamah Agung yang terkait dengan hukum acara khusus di peradilan TUN dan Mahkamah Agung, serta norma-norma dalam undang-undang yang mengaturnya masing-masing.

www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran

Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sinar Grafika

Buku Pengamanan Pilkada Kalteng di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Protokol Kesehatan ini merupakan momen proses persiapan Polda Kalimantan Tengah dan jajaran dalam rangka mengamankan dan menyukseskan kegiatan tersebut yang telah kita mulai sejak pertengahan tahun 2020. Polda Kalimantan Tengah sebagai unsur pelaksana utama dalam pengamanan kegiatan tersebut berupaya secara maksimal mempersiapkan jajarannya. Persiapan secara komprehensif baik dalam hal kesiapan kemampuan personel, kesiapan sarana prasarana yang dapat beroperasi dengan baik, serta kesiapan dukungan logistik secara optimal demi mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu Pilkada serentak di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah. Penduduk Kalimantan Tengah yang sangat heterogen baik suku maupun agama, sangat rentan dengan gesekan bernuansa SARA yang akibatnya berdampak luas hingga ke seluruh pelosok daerah dan meninggalkan trauma berkepanjangan. Beberapa kasus menonjol yang terjadi juga apabila tidak ditangani secara profesional dapat menimbulkan keresahan dan memicu gejala di masyarakat. Begitu juga dengan potensi konflik horizontal antar kelompok seperti konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan, konflik antarormas, konflik pertanahan dan perkebunan serta konflik permasalahan tapal batas. Dalam konteks pengamanan Pemilu Pilkada potensi-potensi kerawanan yang ada

Buku ini berisikan materi tentang Kesiapan Polda Kalimantan Tengah dalam Pemilu Pilkada Tahun 2020, yang kami rangkum dalam beberapa bab

berkaitan tentang gambaran umum Provinsi Kalimantan Tengah, Asta Siap, profil dan persiapan Polres jajaran Polda Kalimantan Tengah, kasus-kasus menonjol yang terjadi, serta terobosan kreatif, yang kesemuanya itu bertujuan agar pembaca bisa melihat gambaran secara umum hingga ke khusus. Sesuai pesan dari Kapolri bahwa persiapan baik secara fisik dan mental akan dapat meningkatkan kemampuan tugas dan fungsi perangkat personel Polda Kalimantan Tengah dalam bertugas di lapangan.

Kelembagaan Pemilu untuk Pemilu Bermartabat

Penerbit Widina Ketersinggungan bermula dari cara-cara berkomunikasi dalam menyampaikan sesuatu yang kadang tidak memperhitungkan siapa orang yang dihadapi, apa ucapan itu pantas disampaikan, dan apakah kondisi dan situasi dalam penyampaian itu cukup kondusif atau justru kurang tepat. Ketersinggungan karena ucapan yang salah dan tidak penuh pertimbangan jika disalahtafsirkan oleh penerima informasi bisa berakibat fatal. Kerenggangan atau putusannya hubungan silaturahmi persaudaraan, larinya pelanggan, bahkan bisa terjadi saling mengumpat atau tindak aksi kekerasan fisik yang berujung pada delik tindak pidana. Ketersinggungan sebenarnya bisa dihindari jika kita bisa memahami etika komunikasi. Dengan memahami dan mempraktikkan etika komunikasi yang baik, maka kedua belah pihak bisa saling menerima manfaat tanpa ada yang harus jadi korban, terutama dalam hal perasaan. Mengingat pentingnya etika berkomunikasi, maka buku ini ditulis dengan tujuan untuk menjadi pembelajaran bagi mahasiswa maupun anggota masyarakat lainnya agar memiliki pengetahuan dan wawasan

tentang etika komunikasi sesuai perundang-undangan yang ada, sehingga bisa menjadi pribadi yang bijak dan santun dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Selain dari itu, buku ini juga diharapkan bisa memberi sumbangan pikiran dalam mengurangi ketegangan-ketegangan dalam bermasyarakat akibat kurangnya perhatian dalam hal-hal yang berkaitan dengan etika komunikasi. Etika Komunikasi Menjadi Manusia yang Santun Berkomunikasi dalam Era Digital hadir untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu komunikasi, dan sekaligus diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti dalam praktik-praktik komunikasi yang lebih etis dalam menciptakan manusia yang santun berkomunikasi di era digital saat ini. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara

Kencana Sudah terlalu banyak teori yang berasal dan dikembangkan di luar Indonesia mendominasi –jika tidak mau dikatakan menghegemoni, menguasai dan bahkan tidak terasa telah mendikte— isi kepala dan pemikiran hukum serta politik di Indonesia. Karena itu maka sudah saatnya bangsa Indonesia membangun secara mandiri membangun paradigmanya sendiri, fi Isafat hukum atau jurisprudence-nya sendiri yang dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan ramuan-ramuan yang tersedia dalam jiwa bangsa (Volksgeist) Indonesia sendiri. Buku-buku di atas, dan juga buku ini berangkat dari keprihatinan, namun lebih kepada optimisme bahwa bangsa Indonesia juga dapat merancang bangun dan mengembangkan teori, filsafat, jurisprudence sendiri, tanpa harus terus-

terusan bergantung kepada pemikiran dan filsafat yang datang dari, terutama Barat, dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan peradaban dunia mengenai hukum dan politik serta kemasyarakatan dan kebudayaan.

Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas wawasan Ilmu

Buku ini disusun untuk melayani mahasiswa Ilmu Komunikasi. Selain itu diperuntukkan juga bagi mahasiswa lainnya dalam matakuliah yang hampir sama. Buku ini juga dapat melayani masyarakat peminat jurnalistik yang

memerlukan up date sekitar perkembangan dunia jurnalistik kekinian sejalan dengan perkembangan zaman. Sasaran yang ingin dicapai dengan buku ini, secara umum menginginkan mahasiswa memiliki pemahaman yang holistik tentang jurnalistik, baik secara teoretis maupun praktis. Secara khusus mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan praktis dalam menyusun karya jurnalistik, khususnya teknis menulis literary journalism yang merupakan hasil perpaduan keterampilan antara jurnalistik terapan dan sastra terapan. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)

Best Sellers - Books :

- [Can't Hurt Me: Master Your Mind And Defy The Odds By David Goggins](#)
- [Little Blue Truck's Springtime: An Easter And Springtime Book For Kids By Alice Schertle](#)
- [Adult Children Of Emotionally Immature Parents: How To Heal From Distant, Rejecting, Or Self-involved Parents By Lindsay C. Gibson Psyd](#)
- [Saved: A War Reporter's Mission To Make It Home By Benjamin Hall](#)
- [Playground](#)
- [Beyond The Story: 10-year Record Of Bts By Bts](#)
- [The Collector: A Novel](#)
- [The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times](#)
- [Baking Yesteryear: The Best Recipes From The 1900s To The 1980s](#)
- [Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?](#)